



Judul : Nggak Sabar Duduki Kursi Pimpinan DPR dan MPR: PDIP Tarik-tarik Novanto dan Zulhas Dalam Revisi UU MD3
Tanggal : Sabtu, 14 Oktober 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Enggak Sabar Duduki Kursi Pimpinan DPR & MPR

PDIP Tarik-tarik Novanto & Zulhas Dalam Revisi UU MD3

Tak kunjung rampungnya revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) membuat PDIP uring-uringan. PDIP tak kuat terus-terusan diam dan menunggu. PDIP pun menagih janji Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua MPR Zulkifli Hasan untuk segera merampungkan revisi itu.

REVISI MD3 ini sangat penting bagi PDIP. Revisi ini akan menjadi payung hukum bagi PDIP untuk bisa menikmati kursi pimpinan DPR dan MPR. Namun, proses revisi tak selancar yang dibayangkan PDIP. Dimulai sejak Desember 2016, sampai sekarang, revisi itu belum selesai juga. Padahal, yang bakal direvisinya hanya sedikit, yaitu menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR demi mengagomodir PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014.

Anggota Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari mengungkapkan, pada awal revisi MD3 diwacanakan, Novanto dan Zulhas (sapaan Zulkifli Hasan) pernah bertemu dengan Ketua Umum

PDIP Megawati dalam kesempatan berbeda. Namun, isinya sama, yaitu mengamini bahwa PDIP berhak atas jatah kursi pimpinan parlemen. Novanto dan Zulhas pun berjanji mengawal revisi UU MD3. Namun, hingga hampir satu tahun, janji itu belum dipenuhi.

"Janjinya mana? Semua pimpinan fraksi juga mengakui bahwa itu (kursi pimpinan) hak PDI Perjuangan. Itu konsensus tak tertulis," ujar Eva.

Kata Eva, realisasi janji sangat penting. Bukan hanya untuk mengembalikan azas proporsionalitas pimpinan parlemen, melainkan juga mengembalikan hak mayoritas rakyat yang menginginkan PDIP memimpin

parlemen. Keinginan rakyat itu tercermin dari kemenangan PDIP dalam Pemilu 2014.

Menurut Eva, pimpinan DPR dan MPR yang ada saat ini dipilih dalam proses yang menyimpang. Sebab, pemilihan dilakukan dengan sistem paket yang saat itu digawangi Koalisi Merah Putih (KMP). PDIP, yang merupakan partai pemenang Pemilu, tidak dapat apa-apa akibat kalah koalisi. Padahal, pada pemilihan pimpinan DPR dan MPR sebelumnya didasarkan pada perolehan suara Pemilu atau yang disebut sistem proporsionalitas. Pemenang Pemilu selalu menjadi pimpinan DPR dan MPR.

"Kita tak ingin hak rakyat yang memilih PDI Perjuangan menjadi speaker DPR dibajak. Dengan merevisi UU MD3, kita menganulir dan mengoreksi anomali yang ada," tegas Anggota Komisi XI DPR itu.

Jika revisi UU MD3 tak kunjung dirampungkan, kata Eva,

fraksi dan DPP PDIP bisa saja mendorong kebijakan lebih ekstrem untuk memenuhi keinginan politiknya. Misalnya, dengan meminta Presiden Jokowi membekukan parlemen dan menyusun ulang.

Namun, Eva memastikan tidak ingin melakukan hal itu. Kata dia, partainya memegang aturan main politik yang beradab, sehingga tak akan menggunakan tangan besi demi kursi politik. Dia bilang, pihaknya hanya berharap agar Novanto dan Zulhas segera merealisasikan janjinya menggolkan revisi MD3 itu.

"Kalau (Novanto dan Zulhas) mau mengoreksi anomali-anomali itu, ya sekarang. Mereka mau meninggalkan legacy baik apa tidak? Ini kesempatan terakhir untuk mengoreksi agar segala sesuatunya menjadi baik," tekan Eva.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mendukung keinginan PDIP agar UU MD3

segera direvisi. Dia mengakui, UUD 1945 memang tak mengatur soal berapa banyak pimpinan parlemen dan siapa saja yang boleh memimpinya. Namun, pembuat hukum dapat didasarkan pada kesepakatan sebuah rasionalitas. Makanya, MD3 yang ada saat itu perlu direvisi agar sesuai dengan aspek rasionalitas.

"Pihak yang berhak menduduki atau mendapatkannya kursi pimpinan parlemen adalah pemilik suara terbanyak dalam pemilihan umum. Fraksi terbesar atau partai pemenang harus jadi pimpinan. Itulah rasionalis demokratisnya," ujar Margarito.

Karenanya, ia mendorong agar fraksi-fraksi di DPR kembali pada azas proporsional, mengusung paradigma dan praktek politik berkeadaban. "Demokrasi kita sehat kalau pemilik kursi paling banyak menjadi pimpinan. Itu mesti dilembagakan di UU MD3. Itu harus jadi prinsip untuk Pemilu berikutnya," tandasnya. ■ ONI